

PENYUSUNAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) DI KANTOR DISTRIK SORONG MANOI

Roberthair Suripatty, Berti Pakaila, Samuel Warella, Arce Yulita Ferdinandus

Universitas Victory Sorong

rsuripatty65@gmail.com, bertipakaila@unvicsorong.ac.id, samuelwarella@gmail.com, arceferdinandus@gmail.com

ABSTRACT

Public sector budgeting involves the process of determining the amount of fund allocation for each activity program in monetary units. The budgeting process for public sector organizations begins with strategy preparation and strategic planning which has been completed. The budget is an articulation of the results of strategy formulation and strategic planning that have been made. The budgeting stage is very important because a budget that is ineffective and not performance oriented can thwart the plans that have been prepared. The budget is a managerial plan for action that facilitates the achievement of organizational goals. In this research, the author formulates the problem of How the Budget Preparation Process is at the Manoi District Office, Sorong City. The data analysis technique using the qualitative descriptive method is a method of developing a theory that has been built from data that has been obtained in the field by conducting exploration, then collecting data in depth, starting from observation to preparing reports.

Keywords: *Public Sector Budgeting, Performance Orientation, APBD Preparation.*

PENDAHULUAN

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokrasi menjadi suatu fenomena global termasuk Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang Pengelolaan Keuangan Negara. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut atas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah seperti yang disebut di atas di dana dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD), yang merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa satu tahun anggaran. Dalam Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 19 (1) dan menyebutkan bahwa, dalam rangka penyusunan RAPBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

Organisasi sektor publik tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi sering kali keinginan tersebut terkendala oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Disinilah fungsi dan peranan penting anggaran. Penganggaran sektor publik dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai dari penyusunan strategi dan perencanaan strategi yang telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategi yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Anggaran merupakan manajerial plan for action yang memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Dalam penyusunan APBD, pemerintah daerah telah menerapkan partisipasi setiap satuan kerja dalam penyusunan anggaran masing-masing SKPD memuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang biasa disebut RKA SKPD. Dalam RKA SKPD, masing-masing SKPD telah membuat indikator kinerja yang akan dicapai untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Anggaran

Menurut Mardiasmo (2012:61): "Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Menurut Freeman (2013), anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (the process of allocating resources to unlimited demands). Pengertian tersebut mengungkapkan peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi sektor publik. Menurut Dedi Nordiawan (2006:48): "Anggaran dapat juga dinyatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran financial". Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sekedar rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya.

Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran

Partisipasi sebagai suatu proses mengevaluasi para individu dan menetapkan penghargaan atas dasar sasaran anggaran yang telah dicapai serta keterlibatan dan pengaruh individu dalam penyusunan anggaran. Dalam anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja, partisipasi dan pertanggung jawaban (accountability) kepada masyarakat sebagai stakeholder daerah menjadi sangat penting. Partisipasi anggaran juga dapat diartikan sebagai keterlibatan dan pengaruh individu di dalam menentukan dan menyusun anggaran ada di dalam devisi atau bagian baik secara periodik atau pun tahunan. Proses penyusunan anggaran yang diinterpretasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberi informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana program tersebut dibiayai penyusunan dan pelaksanaan anggaran tahunan merupakan rangkaian proses anggaran.

Perencanaan Tujuan dan Sasaran

Siklus manajemen (perencanaan dan pengendalian) dimulai dengan tahapan aktivitas perencanaan tujuan dasar dan sasaran. Pemerintah Daerah umumnya menetapkan tujuan dasar dalam rumusan luas dan jangka panjang yaitu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan sasaran dirumuskan dalam format yang lebih fokus dan mengarah pada bidang-bidang pemerintah dan pelayanan masyarakat. Perubahan yang cukup mendasar dalam era otonomi ini adalah sebagian dari kewenangan pemerintah pusat beralih menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, pemerintah dan masyarakat di daerah diberi keleluasaan untuk mengatur rumah tangga di daerahnya secara mandiri. Konsep pembangunan yang semula lebih bernuansa sentralistik, berubah menjadi konsep pembangunan yang demokratis, lebih mengedepankan pihak-pihak yang terlibat (stakeholder) dalam pembangunan sejak masa perencanaan, pelaksanaan sampai masa pengawasan.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

Menurut Deddi Nordiawan (2005:90) “berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD, kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju. Prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Sedangkan pendekatan penganggaran terpadu di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencanakerja dan anggaran. Dan pendekatan penganggaran

berdasarkan prestasi kerja, dilakukan dengan memerhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan output yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan output tersebut.

METODE

Subyek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan berperan sebagai sumber informasi. Subyek penelitian dalam penulisan ini adalah : Kepala kantor distrik Sorong Manoi Kota Sorong, Kepala Bagian Keuangan kantor distrik Sorong Manoi Kota Sorong. Objek penelitian adalah Kantor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil pengamatan dan wawancara dengan Pejabat Bagian Keuangan sedangkan data sekunder diperoleh dengan melihat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Catatan atas Laporan Keuangan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dengan metode deskriptif kualitatif adalah metode dengan mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan dengan melakukan penjelajahan, kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam, mulai dari observasi hingga penyusunan laporan.

HASIL

Analisis Terhadap Proses Penyusunan Rencana Kerja (RKA-SKPD)

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan Hasil wawancara yaitu : bahwa Penyusunan rancangan anggaran satuan kerja perangkat daerah Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kantor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong dimulai dari pengumpulan data dari bidang program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Program kegiatan yang disusun setiap bidang didasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Distrik Sorong Manoi yang memberikan gambaran dan arahan kebijakan serta strategi pembangunan sebagai

tolok ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Distrik Sorong Manoi.

Analisis Terhadap Proses Perencanaan Strategis Dalam Menyusun Anggaran Pada Kantor Distrik Manoi Kota Sorong

Dalam penyusunan strategi Kantor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong dengan memperhatikan nilai-nilai kualitas, kerjasama dan koordinasi serta tanggung jawab dan akuntabilitas. Kantor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong dalam penyusunan strategi menggunakan analisis matriks SWOT dengan menganalisa lingkungan internal dan eksternal organisasi. Dalam menganalisa faktor kunci keberhasilan berdasarkan analisa SO, ST, WO dan WT dengan keterkaitannya dengan visi misi nilai-nilai Kantor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong.

Analisis Terhadap Program Rencana Kerja

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020 serta uraian Rumusan Perencanaan Strategis Kantor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong untuk tahun 2020 program dan kegiatan yang merupakan Rencana Kerja Kantor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong, selaku unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum Daerah yang telah disusun melalui prose penyusunan strategi dan prioritas dari arah kebijakan, visi dan misi, tujuan, sasaran, tugas, fungsi dan program.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kantor Distrik Sorong Manoi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor : 7 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Distrik dan Kelurahan Kota Sorong dan disempurnakan dengan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pemekaran dan Pembentukan Distrik dan Kelurahan dalam Wilayah Pemerintah Kota Sorong serta Peraturan Daerah Kota Sorong No:51 Tahun 2016 Tanggal 14 Desember 2016. Proses Penyusunan Anggaran di Distrik Sorong Manoi di mulai dari penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA/PPAS sampai dengan Rencan Kerja Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kemudian disajikan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Penyusunan Anggaran menggunakan pendekatan perencanaan, program dan anggaran terpadu. PPBS mensyaratkan organisasi menyusun rencana jangka panjang untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui program-program.

Dalam Penyusunan Anggaran di Distrik Sorong Manoi hendaknya dilakukan tepat waktu agar pelaksanaan dan penggunaanya dapat dipertanggung jawaban. Kinerja Keuangan Aparatur pemerintah yang ada harus ditingkatkan lagi baik agar

supaya dalam penyusunan anggaran akan berjalan dengan baik dan tepat waktu penyampaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Freeman 2013, Manajemen. Jakarta : Erlangga.

Mardiasmo 2012 Perpajakan. Yogyakarta CV. Andi Offset.

Dedi Nordiawan 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Salemba Empat

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta

Sony Yuwono 2002. Petunjuk Praktis Balanced Scorecard : Menuju Organisasi yang berfokus pada strategis. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Sony Yuwono dkk 2006. Penganggaran Sektor Publik. Bayumedia Publishing.

Menurut Sugiyono (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan R dan D. Bandung : Alfabeta

Ritonga, Parlaungan, Bangun. 2008. Proses Penyusunan Anggaran Satuan Kersa Peranskat Daerah (RKA – SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Skripsi). Universitas Sumatera Utara.